

Tak Puas Dulu

PONTIANAK - Setelah dua tahun mendapat opini wajar dengan pengecualian dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, kali ini Pemerintah Kota Pontianak mendapat opini tertinggi, wajar tanpa pengecualian. Penyerahan opini itu diterima Wali Kota Pontianak Sutarmidji dan Ketua

• ke halaman 15 kolom 5



Tak Puas Dulu

Sambungan dari halaman 9

DPRD Hartono Azas, kemarin (16/5). "Tiga tahun lalu Kota Pontianak dapat disclaimer (opinion), dua tahun berturut-turut WDP, sekarang WTP," kata Sutarmidji.

Sutarmidji puas dengan opini tersebut. Keinginan yang sering disebutnya pada beberapa pertemuan formal dengan jajaran Pemkot Pontianak itu terwujud. Kata Sutarmidji, "ini hasil kerja semua jajaran Pemkot Pontianak."

Walau WTP bukan berarti opini itu tanpa catatan. Sutarmidji mengakuinya. Terdapat tiga catatan dari BPK terhadap pengelolaan keuangan di Pemkot Pontianak. Salah satunya pengelolaan barang di dinas kependudukan dan catatan sipil. Dikatakan Sutarmidji, hal itu sudah disadari sebelumnya dan akan dilakukan perbaikan.

"Catatan yang diberikan sebenarnya tidak susah. Pada disdukcapil misalnya, memang tahun lalu dinas itu sibuk mengurus e-KTP sehingga ada kerjaan yang tidak fokus dilakukan," ungkapnya.

Diwawancara terpisah Ketua DPRD Kota Pontianak Hartono Azas memberi apresiasi kepada Pemkot yang telah bekerja keras sehingga mendapat predikat tertinggi pada opini BPK. Namun predikat tersebut menurutnya tidak terlepas juga dari peran

dewan. "Saya ucapkan selamat pada Pemkot Pontianak," tuturnya.

Peran seluruh anggota dewan, komisi, badan dan alat kelengkapan lainnya yang telah membangun kerjasama dengan eksekutif terbukti menghasilkan hal yang baik. Dengan fungsi pengawasannya, kata Azas, dewan turut membangun tata kelola pemerintahan yang berkualitas. "Saya juga berterimakasih kepada kawan-kawan dewan," ucapnya.

Dengan WTP menurut Azas pengelolaan keuangan di Kota Pontianak terhindar dari hal yang menyangkut penyimpangan. Hal tersebutlah perlu dipertahankan. Salah satu untuk mempertahankan itu, kata dia, komunikasi antara eksekutif dan legislatif mesti terjalin dengan baik. "Pertahankan juga komunikasi antara eksekutif dan legislatif yang telah terbangun baik selama ini," pintanya.

Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat Adi Sudibyo mengharapkan hasil perhitungan laporan keuangan Pemkot Pontianak Tahun Anggaran 2011 yang mendapat penilaian opini wajar tanpa pengecualian tidak menjadi euforia berlebihan. Melainkan dapat menjadi acuan dan dasar untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih baik.

Ia pun meminta agar Wali Kota Pontianak dan jajaran

dapat mempertahankan prestasi yang telah diperoleh. Sekaligus mampu menciptakan pemerintah kota yang lebih transparan dan akuntabel. "Semoga ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain," kata Adi.

Adapun dasar pemeriksaan BPK yakni Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Hasil pemeriksaan itu, BPK menyatakan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan Pemkot Pontianak, dengan paragraf penjas, yaitu Pemerintah Kota Pontianak belum mengelola persediaan barang cetakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara memadai.

Belum informatif dalam menyajikan data aset tetap dan menyajikan aset milik pihak lain, serta belum mengelola pendapatan retribusi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara memadai. Karena itu perlu meningkatkan mekanisme pengendalian intern terkait penerimaan pendapatan retribusi persampahan. Agar tidak terjadi kembali penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah. "Tiga hal itu yang mesti diperbaiki," kata Adi. (hen/stm)